

Abstrak

Dalam pertanahan, untuk menjamin kepastian hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah, Pemerintah mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia yang akhir dari proses pendaftaran tanah ini lahirnya sertipikat sebagai tanda bukti hak dan sebagai alat pembuktian yang kuat. Pendaftaran tanah di Indonesia memiliki sistem negatif yang kekurangannya yaitu sertipikat yang diterbitkan dapat dibantah dengan memberikan bukti yang kuat. Dalam pelaksanaannya pada penelitian ini, sistem negatif ini memunculkan sertipikat ganda yang menimbulkan sengketa, sehingga peneliti bermaksud untuk mengkaji penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah bersertipikat ganda melalui mediasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi tersebut. Metode pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer yaitu hasil wawancara dengan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas dan data sekunder yang bersumber dari studi kepustakaan dan perundang-undangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif, diolah dengan analisis teoritik yang seluruhnya akan disajikan dalam bentuk teks naratif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, meskipun tidak mengatur secara luas dan detail, namun faktor yang sangat mempengaruhi pelaksanaan mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas yaitu Faktor Penegak Hukum dan Faktor Masyarakat. Faktor Penegak hukum yaitu mengarah pada keahlian/kemampuan mediator sedangkan faktor masyarakat adalah kemauan pihak untuk menyelesaikan masalah dengan mediasi.

Kata Kunci: Mediasi, Sengketa Tanah, Sertipikat Ganda

Abstract

In Land affairs, to guarantee legal certainty regarding the ownership of land rights, the Government conducts land registration throughout Indonesia, at the end of the land registration process a certificate is issued as proof of rights and as a strong means of proof. Land registration in Indonesia has a negative system, the drawback is that certificates issued can be refuted by providing strong evidence. In its implementation in this study, this negative system gave rise to multiple certificates which gave rise to disputes, so the researcher intends to examine the settlement of disputes over ownership of dual certificated land rights through mediation by the Banyumas Regency Land Office and the factors that influence the implementation of this mediation. The approach method used for this research is empirical juridical with descriptive-analytical research specifications. The data used are primary, namely the results of interviews with the Banyumas District Land Office, and secondary data sourced from literature and legislation studies. The data obtained is then analyzed using a qualitative approach, processed with theoretical analysis which will all be presented in the form of narrative text. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the implementation of mediation at the Banyumas Regency Land Office is carried out following the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Number 21 of 2020 concerning Handling and Settlement of Land Cases, although it doesn't regulate broadly and detail, but the factor that really influence the implementation of mediation at the Banyumas Regency Land Office were Law Enforcement Factors and Community Factors. Law enforcement meant are that mediator's skills and abilities to lead the mediation session whereas the Community Factors is about willingness of the parties to resolved the issue by mediation.

Keywords: Mediation, Land Disputes, Multiple Certificates